

SEKILAS APBN

Budget Issues Quick Response

INSENTIF HULU MIGAS MEMIKAT, INVESTOR AKAN TERPIKAT

Deandra Chasmir



APBN 2022 telah bekerja keras untuk mencover peningkatan subsidi dan kompensasi energi yang jumlahnya meningkat beberapa kali lipat dari APBN 2022 awal sebesar Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun. Dan diperkirakan subsidi dan kompensasi energi sebesar 502,4 triliun ini tidak akan cukup hingga akhir tahun karena fluktuasi harga internasional dan volume penggunaan yang semakin naik terus karena meningkatnya aktivitas masyarakat.

Beban subsidi dan kompensasi Energi yang besar ini salah satunya disebabkan oleh Indonesia merupakan Negara Net Importir minyak. Hal ini disebabkan oleh rendahnya perkembangan investasi hulu migas di Indonesia. Akar permasalahan rendahnya perkembangan investasi hulu ini disebabkan oleh iklim investasi hulu migas kurang menarik. Berdasarkan perspektif investor, keputusan melakukan investasi di hulu migas didasari pada Prospektivitas dan Daya Tarik Fiskal. Berdasarkan Asesmen Woodmac, Indonesia termasuk Negara yang memiliki Prospektivitas baik (diatas rata-rata). Namun daya saing fiskal yang masih perlu ditingkatkan.

Indonesia mempunyai dua rezim fiskal yaitu cost recovery dan gross split. Rezim fiskal PSC cost recovery di Indonesia dapat dikatakan cukup rumit diantaranya memasukan instrumen seperti FTP dan DMO. Sedangkan Rezim Fiskal PSC Gross split di Indonesia masih belum efektif dan terkesan menghalangi proyek-proyek yang mensyaratkan pembangunan infrastruktur baru karena negara mendapatkan bagian penerimaan negara sebelum kontraktor merecover initial costs dan akhirnya memperpanjang payback period kontraktor. Sehingga, pelaksanaan kedua rezim fiskal tersebut belum optimal dalam mendorong peningkatan investasi di hulu migas. Bahkan kedua rezim fiskal ini terkesan saling berkompetensi bukan saling melengkapi.

Dari perkembangan kedua rezim fiskal ini, Maka sudah saatnya Indonesia perlu segera memperbaiki fiscal term secara revolusioner ketimbang evolusioner dengan maksud untuk meningkatkan daya Tarik investasi sektor hulu migas, agar mampu bersaing dengan negara-negara produsen migas lainnya. Perbaikan desain fiscal term sektor hulu migas tersebut diarahkan untuk memberikan keadilan manfaat antara kontraktor dan negara, dengan mengalihkan prioritas manfaat dari mengutamakan pendapatan fiskal negara ke optimalisasi manfaat migas yang mendorong ketertarikan investasi dan peningkatan kesejahteraan publik. Ketertarikan investasi disektor hulu migas akan menjamin pendapatan fiskal negara dan kesejahteraan public dalam waktu Panjang. Untuk menjamin tingkat keuntungan yang wajar bagi kontraktor (IRR), pemerintah disarankan menurunkan tingkat SPLIT, CIT, BPT, memberikan insentif Tax holiday, pemberlakuan assume and discharges (pajak tidak langsung DTP) hingga masa akhir kontrak, DMO Holiday, percepatan depresiasi, dan split FTP.